

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab II ini akan diuraikan teori inflasi, jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga SBI, pengeluaran pemerintah, pajak serta teori-teori lain yang berkaitan dengan penelitian.

2.1. Definisi Inflasi

Definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dalam persentase yang besar, bukanlah merupakan inflasi (Nopirin, 1996: 25).

Tingkat inflasi terutama dimaksudkan untuk menggambarkan perubahan-perubahan harga-harga yang berlaku dari satu tahun ke tahun lainnya. Untuk menentukan perlu diperhatikan data indeks harga konsumen dari suatu tahun tertentu dan seterusnya dibandingkan dengan indeks harga pada tahun sebelumnya. Rumus yang dipakai untuk menentukan laju inflasi adalah sebagai berikut (Suharyadi, 2003: 152):

$$\pi = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100$$

Di mana:

π = laju inflasi

IHK_t = Indeks harga konsumen tahun ke t

IHK_{t-1} = Indeks harga konsumen tahun ke t-1 (tahun lalu)

2.1.1. Jenis-jenis Inflasi

Berdasarkan sumber atau penyebab kenaikan harga –harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan menjadi tiga bentuk berikut (Sukirno, 2004: 333-336):

(1) Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand Pull Inflation*)

Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi. Selain pada masa perekonomian berkembang pesat, inflasi tarikan permintaan juga dapat berlaku pada masa perang atau ketidakstabilan politik yang terus menerus. Dalam masa seperti ini pemerintah berbelanja jauh melebihi pajak yang dipungutnya. Untuk membiayai kelebihan pengeluaran tersebut pemerintah terpaksa mencetak uang atau meminjam dari bank sentral. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan tersebut menyebabkan permintaan agregat akan melebihi kemampuan ekonomi tersebut menyediakan barang dan jasa. Maka keadaan ini akan mewujudkan inflasi.

(2) Inflasi Desakan Biaya (*Cost Push Inflation*)

Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji atau upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi ini. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang.

(3) Inflasi diimpor

Inflasi juga dapat bersumber dari barang-barang yang diimpor. Inflasi ini akan terwujud apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Kenaikan harga barang impor akan menaikkan biaya produksi, dan kenaikan biaya produksi mengakibatkan kenaikan harga-harga.

2.1.2. Teori-teori Inflasi

(1) Teori Moneteris

Menurut moneteris, inflasi merupakan fenomena moneter. Artinya, inflasi selalu timbul sebagai akibat bertambahnya jumlah uang (Nopirin, 1996: 20). Pertambahan jumlah uang beredar dalam masyarakat, dapat terjadi karena dua sebab :

- a. Kenaikan jumlah uang sebagai akibat dari kebijakan moneter yang ekspansif dari bank Sentral.
- b. Defisit anggaran belanja pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang baru.

(2) Teori Strukturalis

Teori mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberikan tekanan pada ketegaran (*rigidities*) dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang.

Ketegaran itu berupa :

- a. Penerimaan ekspor yang inelastis, baik akibat dari *terms of trade* yang terus menerus memburuk maupun penawaran atau produksi ekspor yang tidak responsif terhadap kenaikan harga. Akibatnya kapasitas impor lamban berkembang, dan kondisi tersebut mengharuskan penerapan kebijakan substitusi impor. Barang-barang substitusi impor memerlukan bahan baku impor. Maka ketika *terms of trade* memburuk dan mengakibatkan kurs juga memburuk, maka harga bahan baku impor menjadi semakin mahal, yang dampaknya terwujud dalam kenaikan harga barang substitusi impor tersebut.
- b. Penawaran produksi bahan makanan dalam negeri yang inelastis, sehingga harga bahan pangan dalam negeri cenderung meningkat. Akibatnya karyawan menuntut kenaikan gaji/upah, yang berarti ongkos produksi meningkat, sehingga harga-harga barang industri akan meningkat (Boediono, 1995: 167-168).

2.2. Definisi Tingkat Bunga

Tingkat bunga adalah biaya yang harus dibayar atas pinjaman yang diterima dan merupakan imbalan atas investasi. Salah satu sifat tingkat bunga adalah sangat mudah berubah-ubah, turun-naik. Hal ini sering terjadi dalam kurun waktu singkat terutama tingkat bunga jangka pendek meskipun tingkat bunga jangka panjang relatif kurang berfluktuasi dibandingkan dengan tingkat bunga jangka pendek. Kedua-duanya cenderung bergerak naik atau turun dalam waktu yang sama (Boediono, 1995: 76-82).

2.2.1. Teori-teori Tingkat Bunga

(1) Teori Klasik (*Loanable Funds*)

Bunga adalah "Harga" dari penggunaan *loanable fund*, atau dana yang tersedia untuk dipinjam (dana investasi). Menurut teori klasik, bunga adalah harga yang terjadi di pasar dana investasi. Dana investasi adalah pendapatan yang diterima melebihi apa yang diperlukan untuk kebutuhan konsumsi selama periode tersebut. Anggota masyarakat yang mempunyai dana investasi yaitu kelompok penabung dan bersama-sama dengan jumlah seluruh tabungan mereka membentuk *supply* atau penawaran akan *loanable fund*. Di lain pihak dalam periode yang sama ada anggota masyarakat yang membutuhkan dana mungkin karena mereka ingin berkonsumsi lebih daripada pendapatan yang diterima selama periode tersebut yaitu para pengusaha yang memerlukan dana untuk operasi atau perluasan usahanya. Mereka ini adalah investor dan jumlah seluruh kebutuhan mereka akan dana membentuk

permintaan akan *loanable fund*. Selanjutnya para penabung dan para investor ini akan bertemu di pasar *loanable funds* dan dari proses tawar-menawar antara mereka akan dihasilkan tingkat bunga keseimbangan. Semakin tinggi tingkat bunga semakin kurang *loanable fund* yang ditawarkan di pasar (Boediono, 1995: 76-82).

(2) Teori Keynes (*Liquidity Preference*)

Teori Keynes mengatakan bahwa tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Teori Keynes khususnya menekankan adanya hubungan langsung antara kesediaan orang membayar harga uang tersebut (tingkat bunga) dengan unsur permintaan akan uang untuk tujuan spekulasi. Permintaan akan uang meningkat apabila tingkat bunga rendah dan permintaan uang turun apabila tingkat bunga tinggi. Tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar uang. Permintaan uang adalah fungsi negatif dari tingkat bunga. Untuk berspekulasi di pasar surat berharga seperti yang digambarkan dalam teori Keynes orang perlu memegang uang tunai, dan karena kegiatan spekulasi tersebut bisa menghasilkan keuntungan maka orang bersedia membayar harga tertentu untuk memegang uang tunai untuk tujuan tersebut. Kemungkinan keuntungan itu sendiri timbul karena adanya ketidakpastian mengenai perkembangan tingkat bunga atau harga obligasi di masa depan. Hanya dalam suasana ketidakpastianlah orang bisa berspekulasi (Boediono, 1995: 76).

2.2.2. Konsep Paradox Gibson

Konsep Paradox Gibson menjelaskan bahwa terdapat bukti empiris tentang kecenderungan harga dan tingkat suku bunga bergerak bersama. Apabila harga mengalami kenaikan, suku bunga juga cenderung naik. Sebaliknya, bila harga mengalami penurunan, maka tingkat suku bungapun juga cenderung menurun.

Kalau perubahan harga diantisipasi sempurna, artinya masyarakat segera berantisipasi terhadap apa yang terjadi, maka suku bunga yang tinggi akan dikaitkan dengan laju inflasi yang cepat. Akan tetapi tidak ada alasan untuk mengharapkan adanya hubungan positif antara kenaikan suku bunga dengan kenaikan laju inflasi. Untuk lebih jelasnya Fisher mengatakan bahwa kalau harga mulai meningkat masyarakat diharapkan jangan percaya. Hal ini disebabkan karena akan memerlukan waktu yang lama sebelum menerima kenyataan bahwa kenaikan harga akan menaikkan suku bunga.

Antisipasi perubahan harga mulai dari lambat dan secara gradual saja, dan setelah tenggang waktu akan mulai menurun dan menurun lagi secara gradual. Sehingga oleh Fisher dikatakan, biarkan harga mulai meningkat karena peningkatan harga tersebut akan stabil baru setelah itu masyarakat berantisipasi terhadap kenaikan harga (Iswardono, 1991 :252).

2.3. Definisi Jumlah Uang Beredar

Di dalam membahas mengenai uang yang terdapat dalam perekonomian, adalah penting untuk membedakan di antara mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah uang yang telah

dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Dengan demikian mata uang dalam peredaran sama dengan uang kartal. Uang beredar adalah semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum.

2.3.1. Jenis-Jenis Uang Beredar

Pengertian uang beredar atau *money supply* dibedakan menjadi menjadi dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas (Sukirno, 2004: 281).

(1) Uang Beredar Dalam Arti Sempit (M1)

M1 yaitu uang kartal ditambah dengan uang giral. Uang kartal di sini hanya mencakup saldo rekening koran milik masyarakat umum yang disimpan di bank. Sedangkan kas saldo rekening koran milik bank pada bank lain atau bank sentral maupun rekening koran milik pemerintah pada bank sentral tidak dimasukkan dalam definisi uang giral (Boediono, 1994: 3-4).

(2) Uang Beredar Dalam Arti Luas (M2)

Uang beredar dalam arti luas (M2) diartikan sebagai M1 ditambah dengan deposito berjangka dan saldo tabungan milik masyarakat pada bank-bank, tetapi tidak mencakup deposito berjangka dan saldo tabungan mata uang asing (Boediono, 1994: 5-6).

(3) Uang Beredar Dalam Arti Lebih Luas (M3)

M3 yaitu M2 ditambah uang kuasi. M3 mencakup semua deposito berjangka dan saldo tabungan, besar kecil, rupiah atau mata uang asing milik

penduduk pada bank atau lembaga keuangan non bank. Seluruh deposito berjangka dan saldo tabungan ini disebut uang kuasi atau *quasi money* (Boediono, 1994: 6).

2.3.2. Teori-Teori Uang Beredar

(1) Teori Kuantitas Uang

Pada dasarnya teori kuantitas uang merupakan suatu hipotesis mengenai penyebab utama nilai uang atau tingkat harga. Teori ini menghasilkan kesimpulan bahwa perubahan nilai uang atau tingkat harga terutama merupakan akibat daripada adanya perubahan jumlah uang beredar. Tidak berbeda dengan benda-benda ekonomi lainnya, bertambahnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat akan mengakibatkan nilai mata uang itu sendiri menurun. Oleh karena menurunnya nilai uang mempunyai makna yang sama dengan naiknya tingkat harga (Soediyono, 1995: 114).

(2) Teori Cambridge (Marshall – Pigou)

Teori Cambridge mengatakan bahwa kegunaan dari pemegang kekayaan dalam bentuk uang adalah karena uang mempunyai sifat likuid sehingga dengan mudah bisa ditukarkan dengan barang lain. Uang dipegang atau diminta oleh seseorang karena sangat mempermudah transaksi atau kegiatan-kegiatan ekonomi lain dari orang tersebut. Jadi berbeda dengan teori Fisher yang menekan bahwa permintaan akan uang semata-mata merupakan proporsi konstan dari volume transaksi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan yang konstan, teori Cambridge lebih menekankan faktor-faktor

perilaku (pertimbangan untung rugi) yang menghubungkan antara permintaan akan uang seseorang dengan transaksi yang direncanakan (Boediono, 1994: 23-24).

(3) Teori Keynes

Teori permintaan akan uang Keynes adalah teori yang bersumber pada teori Cambridge, tetapi Keynes memang mengemukakan sesuatu yang betul-betul berbeda dengan teori moneter tradisi klasik. Pada hakekatnya perbedaan ini terletak pada penekanan Keynes pada fungsi uang yang lain, yaitu sebagai *store of value* dan bukan hanya pada *means of exchange*. Teori ini kemudian dikenal dengan nama teori *Liquidity Preference* (Boediono, 1994: 28).

Di dalam analisis Keynes masyarakat meminta / memegang uang untuk tiga tujuan antara lain :

a. Permintaan uang untuk transaksi

Keynes tetap menerima pendapat golongan Cambridge, bahwa orang memegang uang guna memenuhi dan melancarkan transaksi-transaksi yang dilakukan, dan permintaan akan uang dari masyarakat untuk tujuan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga.

b. Permintaan uang untuk berjaga-jaga

Keynes juga membedakan permintaan akan uang untuk tujuan melakukan pembayaran-pembayaran yang tidak regular atau yang di luar rencana transaksi normal, karena sifat uang yang likuid, yaitu mudah untuk ditukarkan dengan barang-barang lain.

c. **Permintaan uang untuk spekulasi**

Motif memegang uang untuk tujuan spekulasi terutama bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang bisa diperoleh dari seandainya si pemegang uang tersebut meramal apa yang akan terjadi dengan betul. Uang tunai dianggap tidak mempunyai penghasilan, sedangkan obligasi dianggap memberikan penghasilan berupa sejumlah uang tertentu setiap periode selama waktu yang tak terbatas.

2.4. Definisi Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran rutin pemerintah dan pengeluaran pembangunan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintah dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai untuk pembelajaran angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah.

2.4.1. Penentu-Penentu Pengeluaran Pemerintah

(1) **Proyeksi jumlah pajak yang diterima**

Salah satu faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah jumlah pajak yang diramalkan. Dalam menyusun anggaran belanjanya pemerintah harus terlebih dulu membuat proyeksi mengenai

jumlah pajak yang diterimanya. Makin banyak jumlah pajak yang dikumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan (Sukirno, 2004: 151).

(2) Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai

Faktor yang lebih penting dalam penentuan pengeluaran pemerintah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai pemerintah. Pemerintah penting sekali peranannya dalam perekonomian. Kegiatannya dapat memanipulasi/mengatur kegiatan ekonomi ke arah yang diinginkan (Sukirno, 2004: 152).

(3) Pertimbangan politik dan keamanan

Pertimbangan-pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik, perselisihan di antara berbagai golongan masyarakat dan daerah sering berlaku di berbagai negara di dunia. Keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan pembelanjaan pemerintah yang sangat besar, terutama operasi militer perlu dilakukan (Sukirno, 2004: 152).

2.4.2. Fungsi Pengeluaran Pemerintah

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional tidak memegang peranan yang penting dalam menentukan pembelanjaan pemerintah. Dengan perkataan lain, pengeluaran pemerintah pada suatu periode tertentu dan perubahannya dari suatu periode ke periode lainnya tidak didasarkan kepada tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan pendapatan nasional. Dalam masa kemunduran

ekonomi, misalnya, pendapatan pajak berkurang. Tetapi untuk mengatasi pengangguran itu pemerintah perlu melakukan lebih banyak program-program pembangunan, maka pengeluaran pemerintah perlu ditambah. Sebaliknya, pada waktu inflasi dan tingkat kemakmuran tinggi, pemerintah harus lebih berhati-hati dalam pembelanjannya. Harus dijaga agar pengeluaran pemerintah tidak memperburuk keadaan inflasi yang berlaku (Sukirno, 2001; 152).

2.5. Definisi Pajak

Pajak merupakan penerimaan pajak total yang diterima oleh pemerintah. Dalam setiap perekonomian pemerintah perlu melakukan berbagai jenis pembelanjaan. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah diperlukan upaya untuk mencari dana. Dana tersebut terutama diperoleh dari pungutan pajak dari rumah tangga dan perusahaan.

2.5.1. Jenis-Jenis Pajak

(1) Pajak langsung

Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Pajak yang dipungut dan dikenakan ke atas pendapatan mereka dinamakan pajak langsung, yaitu pajak itu secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak (Sukirno, 2004: 135).

(2) Pajak tak langsung

Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya boleh dipindahkan kepada pihak lain. Salah satu pajak tak langsung yang penting adalah pajak impor. Biasanya, pada akhirnya yang akan menanggung beban pajak tersebut adalah para konsumen barang impor. Yang mula-mula membayar pajak adalah perusahaan-perusahaan yang mengimpor barang tersebut. Akan tetapi, pada waktu menjual barang impor tersebut, pengimpor tersebut akan mempertimbangkan pajak impor yang dibayarnya dalam menentukan harga penjualannya. Dengan demikian keuntungannya tidak berkurang. Para pembeli yang akan membayar pajak dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Contoh lain dari pajak tak langsung adalah pajak penjualan. Pajak ini biasanya ditambahkan ke harga penjualan yang ditentukan oleh pedagang-pedagang. Oleh sebab itu pajak penjualan berkecenderungan akan mengakibatkan kenaikan harga (Sukirno, 2004: 136).

2.5.2. Bentuk-Bentuk Pajak Pendapatan

(1) Pajak regresif

Sistem pajak yang persentasi pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi dinamakan pajak regresif. Dalam sistem ini, pada pendapatan rendah, pajak yang dipungut meliputi bagian yang tinggi dari pendapatan tersebut. Tetapi, semakin tinggi pendapatan semakin kecil persentasi pajak itu dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan. Nilai pajak yang sama besarnya tanpa

memperhatikan pendapatan seseorang dapat digolongkan sebagai pajak regresif. Pajak impor dan pajak penjualan dapat digolongkan sebagai pajak regresif, yaitu kepada orang kaya pajak tersebut merupakan sebagian kecil dari pendapatannya. Tetapi untuk golongan miskin, ia meliputi persentasi yang lebih besar kepada pendapatannya. Pembayaran fiskal untuk orang yang bepergian ke luar negeri merupakan contoh lain dari pajak regresif (Sukirno, 2004: 136).

(2) Pajak proporsional

Persentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi dinamakan pajak proporsional. Dalam sistem pajak seperti ini tidak dibedakan antara penduduk yang miskin atau yang kaya dan di antara perusahaan kecil atau perusahaan besar. Mereka harus tetap membayar pajak menurut persentasi yang tetap. Walau bagaimanapun, dalam nilai nominalnya, makin tinggi pendapatan atau kekayaan, makin tinggi pula jumlah pajak yang akan dibayar. Di banyak negara, sistem pajak ini digunakan dalam memungut pajak pendapatan (keuntungan) perusahaan-perusahaan yang berbentuk perseroan (Sukirno, 2004: 136).

(3) Pajak progresif

Sistem pajak yang persentasi bertambah apabila pendapatan semakin meningkat dinamakan pajak progresif. Berikut adalah satu contoh hipotesis dari pajak progresif:

Pendapatan yang dipajak	Persentasi pajak
1. Sampai Rp 500 ribu	2%
2. Rp 501 ribu - Rp 2 juta	4%
3. Rp 2,001 juta - Rp 5 juta	10%
4. Lebih dari Rp 5 juta	20%

Pajak progresif menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayar akan menjadi semakin cepat apabila pendapatan semakin tinggi. Di berbagai negara sistem pajak progresif digunakan untuk memungut pajak pendapatan orang-orang yang bekerja makan gaji. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pendapatan pajak yang lebih banyak. Di samping itu bertujuan untuk lebih meratakan pendapatan.

2.6. Hubungan Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga, Pengeluaran Pemerintah dan Penerimaan Pajak dengan Inflasi.

(1) Hubungan Jumlah Uang Beredar dengan Inflasi.

Sasaran kebijakan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang beredar. Salah satu komponen jumlah uang beredar adalah uang giral (*demand deposit*). Uang giral dapat terjadi melalui dua cara, pertama apabila seseorang memasukkan uang kas ke bank dalam bentuk giro. Kedua, apabila seseorang memperoleh pinjaman dari bank tidak diterima kas tetapi dalam bentuk giro. Deposito yang timbul dengan cara kedua sifatnya lebih *inflatoir* daripada cara pertama. Sebab cara pertama hanyalah pengalihan bentuk saja dari uang kas ke uang giral. Bank sentral dapat mengatur uang giral ini melalui penetapan

cadangan minimum. Untuk menekan laju inflasi cadangan minimum ini dinaikkan sehingga jumlah uang menjadi lebih kecil. Disamping cara ini, Bank Sentral dapat menggunakan apa yang disebut dengan tingkat diskonto (*discount rate*). *Discount rate* adalah tingkat diskonto untuk pinjaman yang diberikan oleh bank sentral pada bank umum yang ada pada Bank Sentral. *Discount rate* ini bagi bank umum meruakan biaya untuk pinjaman yang diberikan oleh Bank Sentral. Apabila tingkat diskonto dinaikkan (oleh Bank Sentral) maka gairah bank umum untuk meminjam makin kecil sehingga cadangan yang ada pada Bank Sentral juga mengecil. Akibatnya, kemampuan bank umum memberikan pinjaman pada masyarakat makin kecil sehingga jumlah uang beredar turun dan inflasi dapat dicegah (Nopirin, 1987; 34).

(2) Hubungan Suku Bunga SBI dengan Inflasi.

Untuk mencapai sasaran akhir berupa pengendalian inflasi, Bank Indonesia menggunakan tingkat suku bunga pasar uang antar bank (PUAB), sebagai sasaran operasional. Untuk mengendalikan tingkat suku bunga PUAB, instrumen utama yang dapat digunakan adalah operasi pasar terbuka (OPT) melalui jual beli SBI. Kegiatan jual beli ini diarahkan untuk mencapai sasaran tingkat suku bunga SBI yang diinginkan melalui perubahan dana perbankan. Tingkat suku bunga SBI kemudian ditransmisikan ke tingkat suku bunga PUAB, untuk selanjutnya diteruskan ke tingkat suku bunga deposito, tingkat suku bunga kredit, dan nilai tukar. Perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar tersebut selanjutnya akan ditransmisikan ke sektor riil, melalui perubahan konsumsi dan investasi atau perubahan permintaan yang

selanjutnya akan menyebabkan perubahan tingkat harga/inflasi (Syahwier dan Rostiana , 2004: 54).

(3) Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Inflasi.

Di dalam masa kemakmuran yang tinggi, dan yang telah menimbulkan keadaan inflasi dalam ekonomi, menjalankan kibijakan fiskal yang seimbang akan memperburuk pula masalah inflasi yang dihadapi. Di dalam masa kemakmuran, pendapatan pemerintah dari pajak akan mengalami kenaikan yang sangat besar. Jika keadaan ini mendorong pemerintah menambah pengeluarannya, maka pengeluaran agregat menjadi bertambah lebih besar lagi dan menimbulkan kelebihan permintaan agregat yang lebih banyak. Keadaan seperti itu akan memperburuk lagi masalah kenaikan harga-harga yang sedang dihadapi. Pada masa ini kibijakan fiskal yang seimbang tidaklah lagi dianggap sebagai suatu kibijakan fiskal yang harus dilakukan setiap waktu. Di dalam masa di mana jurang inflasi terwujud, yaitu pengeluaran agregat melebihi kemampuan perekonomian untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa, kibijakan anggaran belanja surplus perlu dilakukan. Pada waktu itu pemerintah perlu mengurangi pengeluaran agregat yang berlebihan itu dengan menaikkan tingkat dan jumlah pajak yang dipungut dari berbagai golongan masyarakat. Apabila pada mulanya anggaran belanja pemerintah adalah dalam keadaan seimbang, pengurangan pengeluarannya di satu pihak dan kenaikan pendapatan pajaknya di lain pihak, akan menyebabkan anggaran belanja menjadi berbentuk anggaran belanja surplus (Sukirno, 2004; 172-174).

(4) Hubungan Penerimaan Pajak dengan Inflasi.

Terdapat perbedaan antara penganut ekonomi sisi permintaan dengan ekonomi sisi penawaran tentang cara mencegah inflasi. Menurut ekonomi sisi permintaan, inflasi bisa ditekan dengan cara menaikkan pajak atau mengurangi jumlah uang beredar, yang kesemuanya bisa mengurangi permintaan agregat. Menurut pandangan ekonomi sisi penawaran kebijaksanaan tersebut mempunyai efek negatif terhadap penawaran. Kenaikan pajak akan mengurangi gairah buruh untuk bekerja, sedangkan pengurangan jumlah uang beredar akan mengurangi pembentukan modal. Keduanya akan menaikkan ongkos dan mengurangi penawaran. Apabila efek turunnya permintaan lebih besar daripada turunnya penawaran, harga inflasi akan turun. Sebaliknya, apabila turunnya penawaran lebih besar daripada turunnya penerimaan, harga atau inflasi akan lebih tinggi (Nopirin, 1987:160)